SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 119

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan semangat yang membara, kami dengan penuh dedikasi Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung (Renja) untuk tahun 2025. Rencana ini merupakan panduan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas dan penegak integritas dalam pemerintahan Kabupaten Bandung.

Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting karena memasuki periode Pemerintahan pertama bagi Bupati terpilih 2024 yang memerlukan perhatian ekstra dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kita sebagai Inspektorat Daerah. Peran kita sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan, mendorong transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah menjadi semakin krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Rancangan Awal Renja ini kami susun berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya di masa sebelumnya, serta mempertimbangkan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Kami juga mendasarkan Renja ini pada arah kebijakan Kabupaten Bandung yang berkomitmen untuk mencapai pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam penyusunan Renja ini, kami juga telah menggali aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Bandung agar Inspektorat Daerah dapat menjadi mitra yang kuat dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi aset negara.

Mari kita bersama-sama menjadikan Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 ini sebagai panduan untuk mencapai kinerja dan pelayanan yang lebih baik lagi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Soreang, 31 Juli 2024
INSPEKTUR,

Dr. H. MARLAN NIRSYAMSU
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 199512 1001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-7

1.4 Sistematika Penulisan I-9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU **II-1**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD III-2

3.3. Program dan Kegiatan III-13

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian V-1

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan V-2

5.3. Rencana tindak lanjut V-3

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Tabel TC.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Tahun Berjalan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Setelah Perubahan	II-2
Tabel 2.2.	Tabel TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	II-14
Tabel 2.3.	Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung	II-21
Tabel 2.4	Tabel TC-32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung	II-27
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2.	Tujuan Dan Sasaran Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	III-4
Tabel 3.3.	Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Inspektorat Daerahtahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III-15
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	IV-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia menghadapi beragam tantangan dan dinamika yang terus berkembang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan penegak integritas di tingkat daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah.

Evaluasi dan pengalaman dari pelaksanaan Renja di masa sebelumnya menjadi acuan penting bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam menyusun Rancangan Aeal Renja Tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup kinerja, pencapaian tujuan, tantangan, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada tahun 2025, keberadaan Inspektorat Daerah menjadi semakin strategis mengingat peran kritisnya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung harus mampu beradaptasi dengan dinamika politik yang terjadi tanpa mengabaikan prinsip independensi dan integritas.

Dalam latar belakang Renja ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung juga mempertimbangkan berbagai perubahan regulasi dan kebijakan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Perubahan tersebut harus diantisipasi dan direspon dengan tepat agar Renja yang disusun tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung.

Selain itu, partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan semakin berkembang. Masyarakat menjadi semakin kritis dan aktif dalam menyampaikan masukan,

keluhan, dan harapan terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung perlu melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pelaksanaan Renja tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025 yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Renja ini akan menjadi panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan pemenuhan kebutuhan dari aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 273 ayat (3) dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan Bupati Bandung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam menunjang implementasi kebijakan dengan menyelaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi Bupati Bandung terpilih yaitu ***"Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera".***

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2021-2026, memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Atas prioritas pembangunan nasional tersebut diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan

Dengan tema pembangunan “Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di segala Bidang”, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023-2026 memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Masyarakat yang cerdas produktif dan berdaya saing tinggi;
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Energi baru dan terbarukan;
5. Industri manukfaktur, industri jasa dan industri kreatif;
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional yaitu :

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan:
   a. kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin;
   b. pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah;
   c. pengawalan Reformasi Birokrasi; dan
   d. penegakan Integritas; dan
2. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mengawal integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Renja ini bertujuan untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Bandung.

Tujuan Penyusunan Renja Tahun 2025:

1. Meningkatkan Pengendalian Program Pemerintah: Renja ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian terhadap program dan kegiatan pemerintah di Kabupaten Bandung untuk memastikan implementasinya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Renja ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik, serta bertanggung jawab terhadap hasil dan dampak dari kebijakan yang diambil.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas: Renja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Renja ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemerintah daerah, dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan aspirasi terkait pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Renja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Daerah agar dapat menghadapi tantangan yang kompleks dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
6. Mewujudkan *Good Governance*: Renja ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) di Kabupaten Bandung, seperti transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.
7. Dengan adanya Renja yang jelas dan terarah, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan daerah, sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN LALU

a. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**.

   Pada bagian ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi tahun lalu dan capaian kinerja terhadap Renstra.

b. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

   Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Rencana Kerja (Renja)Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung periode sebelumnya.

c. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

   Pada bagian ini memuat penjelasan isu-isu penting yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

d. **Review Terhadap Rancangan Awal.**

Pada Bagian ini memuat hasil reviu dari rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.

e. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Pada Bagian ini memuat usulan-usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
b. **Tujuan, dan Sasaran Renja**
c. **Program dan Kegiatan**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Sehingga dalam penyajian Rencana kerja Inspektorat Tahun 2025 ini tidak terlepas dari pencapaian yang tercantum dalam resntra tersebut. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2023.

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2023 APBD Murni Rp. 27.893.794.013, - dan anggaran setelah perubahan perubahan sebesar Rp. Rp29.594.239.647,-. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 23.084.489.072 dan Belanja Modal sebesar Rp. 782.836.700.

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,50% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 97,99% (sangat tinggi) Inspektorat Kabupaten Bandung dapat dikategorikan berhasil dengan baik dalam pencapaian kinerja hingga Tahun 2023.

Untuk rincian capaian kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagai berikut :

TABEL 2.1.
TABEL TC.29 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG SETELAH PERUBAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6,01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	82,00 Poin	-	81,90 Poin	84,00 Poin	102,44 %	81,9%	81,9%	100%
		Nilai IKM	80,00 Poin	-	76,00 Poin	80,91 Poin	102,44 %	78,0%	78,0%	100%
		Nilai BMD	80,00 %	-	80,00 %	89,00 %	102,44 %	80,0%	80,0%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,00 Dokumen	-	14,00 Dokumen	28,00 Dokumen	200,00 %	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,00 Laporan	-	4,00 Laporan	4,00 Laporan	80,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00 Dokumen	-	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	20,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5,00 Dokumen	-	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	80,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,00 Dokumen	-	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	20,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,00 Dokumen	-	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	80,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5,00 Dokumen	-	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	80,00%	4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00 Laporan	-	4,00 Laporan	4,00 Laporan	80,00%	4 Laporan	4 Laporan	100%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %		0,0%	100%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	100%
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60,00 Dokumen	-	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	20,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335,00 Orang/Bulan	-	87,00 Orang/Bulan	93,00 Orang/Bulan	27,76%	2 Laporan	2 Laporan	100%
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00 Dokumen	-	1,00 Laporan	1,00 Laporan	20,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,00 Laporan	-	0 Laporan	0 Laporan	0%		0,0%	100%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100,00 %	-	100,00 %	98,85 %	98,85%	44 Orang	44 Orang	100%
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120,00 Orang	-	50,00 Orang	32,00 Orang	26,67%		0,0%	100%
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	0 Paket	0 Paket	0%	5 Paket	5 Paket	100%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	12,00 %	-	12,00 %	12,00 %	100,00 %	12 Paket	12 Paket	100%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50,00 Paket	-	9,00 Paket	9,00 Paket	18,00%	12 Paket	12 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15,00 Dokumen	-	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	13,33%	12 Paket	12 Paket	100%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00 Paket	-	12,00 Paket	12,00 Paket	20,00%	7 Paket	7 Paket	100%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35,00 Paket	-	12,00 Paket	12,00 Paket	34,29%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40,00 Paket	-	9,00 Paket	9,00 Paket	22,50%	11 Laporan	11 Laporan	100%
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55,00 Laporan	-	12,00 Laporan	12,00 Laporan	21,82%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,00 Laporan	-	12,00 Laporan	12,00 Laporan	3,00%		0,0%	100%
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10,00 Paket	-	5,00 Paket	5,00 Paket	50,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100,00 %	-	100,00 %	0%	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	1,00 Unit	0 Unit	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya operasional perkantoran	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %		0,0%	100%
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60,00 Laporan	-	12,00 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500,00 Laporan	-	12,00 Laporan	12,00 Laporan	0,16%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00 Laporan	-	12,00 Laporan	12,00 Laporan	20,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00 Laporan	-	12,00 Laporan	12,00 Laporan	20,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %		0,0%	100%
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00 Unit	-	2,00 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,00 Unit	-	49,00 Unit	24,00 Unit	480,00 %	14 Unit	14 Unit	100%
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	-	1,00 Unit	1,00 Unit	20,00%	39 Unit	39 Unit	100%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120,00 Unit	-	12,00 Unit	10,00 Unit	8,33%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT / Non PKPT	100,00 %	-	100,00 %	183,30 %	183,30 %	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	100%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT/Nom PKPT	100,00 %	-	100,00 %	116,20 %	116,20 %	202 Objek/Laporan	202 Objek/Laporan	100%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	310,00 Laporan	-	22,00 Laporan	22,00 Laporan	7,10%	74 Laporan	74 Laporan	100%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	65,00 Laporan	-	65,00 Laporan	65,00 Laporan	100,00 %	16 Laporan	16 Laporan	100%
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9,00 Kesepakatan	-	0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0%	65 Laporan	65 Laporan	100%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	340,00 Laporan	-	74,00 Laporan	74,00 Laporan	21,76%	5 Laporan	5 Laporan	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25,00 Dokumen	-	92,00 Dokumen	92,00 Dokumen	368,00 %	100 Laporan	100 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	45,00 Laporan	-	9,00 Laporan	14,00 Laporan	31,11%	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	250,00 Laporan	-	100,00 Laporan	100,00 Laporan	40,00%	62 Dokumen	62 Dokumen	100%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	38 Laporan	38 Laporan	100%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	150,00 Laporan	-	30,00 Laporan	30,00 Laporan	20,00%	30 Laporan	30 Laporan	100%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40,00 Laporan	-	14,00 Laporan	14,00 Laporan	35,00%	8 Laporan	8 Laporan	100%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah PD yang dicalonkan berpredikat Zona Integritas menuju WBK / WBBM	5,00 Perangkat Daerah	-	5,00 Perangkat Daerah	5,00 Perangkat Daerah	100,00 %		0,0%	100%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00 %	-	100,00 %	61,11 %	61,11%	8 Laporan	8 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	20,00 Rekomendasi	-	4,00 Rekomendasi	4,00 Rekomendasi	20,00%	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	20,00 Rekomendasi	-	4,00 Rekomendasi	4,00 Rekomendasi	20,00%	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi terlaksana	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	6 Laporan	6 Laporan	100%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5,00 Perangkat Daerah	-	55,00 Perangkat Daerah	61,00 Perangkat Daerah	1.220,00%	62 perangkat daerah	62 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10,00 Kegiatan	-	10,00 Kegiatan	10,00 Kegiatan	100,00 %	55 perangkat daerah	55 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	42,00 Perangkat Daerah	-	65,00 Perangkat Daerah	65,00 Perangkat Daerah	154,76 %	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Inspektorat Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Inspektorat s.d Tahun 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
		Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41,00 Perangkat Daerah	-	104,00 Perangkat Daerah	104,00 Perangkat Daerah	253,66 %	104 perangkat daerah	104 perangkat daerah	100%

Dari Tabel 2.1 tersebut terlihat bahwa pada Program Utama Inspektorat yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi kinerja pada masing-masingnya sub kegiatan sudah mencapai target dan cenderung melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan untuk pencapaian target kumulatif Restra memiliki rata-rata pencapaian 89%. Hal ini dikarenakan pada pencapaian tahun ke 1 dan ke 2 renstra, kinerja sub kegiatan telah melampaui target yang ada. Sedangkan pada Program penunjang, target dan realisasi kinerja sudah tercapai 100% dan ada beberapa sub kegiatan pula yang melebih.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa target yang disusun pada renstra lebih rendah dari asumsi pencapaian kinerja nya. Hal perlu mendapatkan koreksi pada renja tahun 2025 ini dengan adanya Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026. Penyesuaian pun dilakukan terhadap satuan-satuan pada target kinerja sub kegiatan yang belum sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, yaitu:

Kedudukan :

Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah

Tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.Dalam upaya mendukung Manajemen Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal, antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.
TABEL TC.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

NO.	INDIKATOR SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SKM	80	Index RB	77	78	79	83,37	83,37	-	79	83,37	Tercapai dan *On The Track*
2	Nilai BMD	90	Index RB	80	80	80	80	80,91	-	80	80	Tercapai dan *On The Track*
3	Level Kapabilitas APIP	4	Index RB	3	3	3	3	3	-	3	3	Belum Tercapai

NO.	INDIKATOR SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Tindak Lanjut atas temuan eksternal/BPK	100	Index RB	72	73	74	75	82,5	-	82,5	82,5	belum sesuainya DO dengan Indikator Kinerja, akan tetapi kinerja tercapai
5	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK / WBMM	100	Index RB	100	100	100	100	100	-	100	100	Tercapai dan *On The Track*

Berdasarkan tabel TC.30 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat satu indicator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu Level Kapabilitas APIP. Serta terdapat pula catatan berupa indikator-indikator kinerja yang belum sesuai dengan Definisi Operasional yang seharusnya, sehingga dalam pencapaian terjadi bias dan ambigu. Kedua catatan analisi ini menjadi catatan pada penyusunan renja Tahun 2025, sehingga akan menjadi bahan dalam penelaahan atau review terhadap rancangan awal RKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang menjadi peran Inspektorat Daerah menjelang Tahun 2025 seperti yang tercantum dalam Permengari 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023 yang menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan Kepala Daerah agar memenuhi kecukupan anggaran pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis, berupa:
   1) Alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembinaan serta pengawasan (tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan)

yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Penggunaan alokasi anggaran pengawasan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD dan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meliputi:
   a) Kegiatan pengawasan;
   b) Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
      (a) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
      (b) Penerapan manajemen risiko;
      (c) Penguatan integritas dan antikorupsi; dan
      (d) Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
   c) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia

Kepala Daerah agar memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawasan dengan mengambil kebijakan strategis, berupa:

1) Pemenuhan kuantitas kebutuhan JF PPUPD dan JFA mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi pembina.
2) Pemenuhan kualitas sumber daya manusia APIP dilakukan melalui:
   a) Pelaksanaan koordinasi terkait rencana pelatihan dengan Kemendagri dan BPKP dalam rangka pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA paling kurang 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per orang.
   b) Dalam hal pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JFA, lnspektorat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas antara lain: bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, benchmarking,

pelatihan alam terbuka, mentoring, coaching, workshop atau lokakarya, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara pelatihan pengembangan kompetensi terkait lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina.

c) Pemberdayaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai tempat uji kompetensi.

c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas Kepala Daerah agar mengambil kebijakan strategis dalam rangka mendukung independensi dan objektivitas APIP daerah berupa:

1) Memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada lnspektur Daerah dalam hal persetujuan (IAC), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, anggaran pengawasan, komunikasi terkait kinerja pengawasan, dan permintaan penjelasan alas pembatasan ruang lingkup pengawasan. Internal Audit Charter

2) Memastikan kegiatan pengawasan bebas dari intervensi pihak manapun dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Dalam hal terjadi campur tangan, lnspektur Daerah agar melaporkan melalui kanal APIP LAPOR.

d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan

Kepala Daerah agar mengambil kebijakan strategis dalam rangka mendukung peran dan layanan APIP daerah berupa:

1) Penguatan pelaksanaan pengawasan dengan memerintahkan lnspektur Daerah untuk:

a) Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan berbasis risiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional JF PPUPD dan JFA sesuai dengan karakteristik jabatannya. Dalam hal jumlah JF PPUPD dan JFA belum sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilaksanakan oleh JF yang tersedia.

b) Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pengawasan terhadap program dan kegiatan yang berkontribusi pada capaian kinerja pembangunan nasional serta Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

c) Meningkatkan peran dan layanan APIP, mencakup:

(1) Audit ketaatan merupakan audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang menjadi obyek audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

(2) Audit kinerja merupakan audit yang dilakukan untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program strategis. Dalam hal ini fokus audit kinerja adalah terhadap sasaran/program strategis bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

(3) Assurance tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh;

(4) Jasa konsultasi merupakan kegiatan-kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

2) Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai berdasarkan orientasi pencegahan (early warning system).

3) Memastikan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sehingga mendorong peningkatan integritas Pemerintah Daerah.

4) Memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait perbaikan tata kelola (*governance*).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah Menyusun Rancangan Awal Renja Pada Bulan Februari 2023 sebagai data awal untuk penyusunan RKPD Tahun 2025. Pagu Indikatif ataupun target kinerja pada Rancangan Renja ini merupakan nilai yang diambil dari Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026. Sehingga belum terdapat penelaahan terhadap kondisi yang berkembang untuk menghadapi tahun 2025.

Penelaahan yang dilakukan terhadap Rancangan awal renja Inspektorat tersebut diantaranya adalah dengan memperhatian Capaian kinerja Tahun lalu serta kebutuhan-kebutuhan menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Review tersebut merubah bebrapa hal pokok diantaranya :

1. Target Kinerja Sub Kegiatan

   Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terdapat kinerja pelayanan yang melebihi target capaian. Sehingga hal ini perlu mendapat penelaahan untuk menyesuaikan target yang ada pada renja selanjutnya.
2. Sub Kegiatan.

   Dengan berkembangnya Aplikasi SIPD serta permendagri tentang nomenklatur pembangunan daerah pada Aplikasi SIPD, pada rancangan awal ini, Inspektorat Daerah berisisiatif untuk menambah 2 sub kegiatan yaitu :

   a. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
   b. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.

Selain itu, berpedoman pada Permendagri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2023, yang mengamanatkan bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota:

a) sampai dengan Rpl .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
b) diatas Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
c) diatas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Dengan memperhatikan kebijakan tersebut maka perhitungan kebutuhan anggaran Inspektorat Daerah diluar belanja gaji dan tunjangan ASN adalah :

1.	Belanja Daerah	Rp.	6.007.122.950.033
2.	Mandatory Anggaran APIP (0,5%)	Rp.	30.035.614.750
3.	Rancangan Awal Anggaran APIP (Diluar Gaji dan Tunjangan ASN)	Rp.	22.037.284.369
4.	Persentase		0,37
5.	Kekurangan	Rp.	**7.998.330.381**

Tabel 2.3.
TABEL TC. 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN BANDUNG

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		INSPEKTORAT DAERAH				**27.692.776.007**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**51.471.852.109**	
	06	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**27.692.776.007**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**51.471.852.109**	
	06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**27.692.776.007**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**51.471.852.109**	
	06:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bandung**	**Nilai AKIP**	**82 Point**	**22.910.833.422**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bandung**	**Nilai AKIP**	**84,2 Point**	**39.643.297.694**	
				Nilai IKM	**79 Point**	**-**			**Nilai IKM**	**80 Point**	**-**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	28 Dokumen	68.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	28 Dokumen	68.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.000.000	-
	6.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	5.000.000	-

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	-
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	10.000.000	-
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	23.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	23.000.000	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	20.928.686.022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	28.560.097.040	7.631.411.018
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	20.910.606.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/bulan	28.517.517.040	7.606.911.018
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.080.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	14.080.000	10.000.000
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	14.250.000	10.000.000
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.250.000	4.500.000
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100 Persen	480.060.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	100 Persen	2.210.060.000	1.730.000.000
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	230.000.000	180.000.000

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	430.060.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	1.980.060.000	1.550.000.000
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	408.099.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	2.948.099.400	2.540.000.000
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.149.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	58.149.400	50.000.000
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.150.000.000	2.150.000.000
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.720.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	53.720.000	50.000.000
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	74.507.200	(35.492.800)
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	58.190.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	123.682.800	65.492.800
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	23.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	25.000.000	1.600.000
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	84.640.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	114.640.000	30.000.000
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	348.400.000	228.400.000
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100 Persen	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100 Persen	3.002.565.084	2.902.565.084
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.355.165.084	2.305.165.084
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	647.400.000	597.400.000
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bandung	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bandung	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	-

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	720.488.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Tersedianya Operasional Perkantoran	100 Persen	2.118.876.170	1.398.388.170
	6.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.500.000	15.000.000
	6.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.693.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	421.193.600	315.500.000
	6.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000	(45.000.000)
	6.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557.294.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.670.182.570	1.112.888.170
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100 Persen	205.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	100 Persen	735.600.000	530.100.000
	6.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	23.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	(23.000.000)
	6.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	130.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	150.600.000	20.000.000
	6.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	60.000.000	40.000.000
	6.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	525.000.000	493.100.000
	06:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Bandung**	**Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan**	**100 Persen**	**2.161.904.415**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Bandung**	**Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan**	**100 Persen**	**5.078.555.700**	**2.916.651.285**
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bandung	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	100 Persen	1.285.419.415	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bandung	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	100 Persen	3.598.018.000	2.312.598.585

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	78 Laporan	208.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	78 Laporan	402.270.000	194.270.000
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	100.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	200.000.000	100.000.000
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	112.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	239.708.000	127.708.000
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	85.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	275.000.000	190.000.000
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	409.760.000	Pengawasan Desa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100 Laporan	963.500.000	553.740.000
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Bandung	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	70.659.415	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Bandung	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1.005.000.000	934.340.585
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62 Dokumen	300.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	92 Dokumen	512.540.000	212.540.000
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	876.485.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.480.537.700	604.052.700
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98 Laporan	589.285.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98 Laporan	522.200.000	(67.085.000)
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30 Laporan	287.200.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	30 Laporan	958.337.700	671.137.700
	06:01:03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Bandung**	**Persentase cakupan penanganan pengawasan**	**100 Persen**	**2.620.038.170**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Bandung**	**Persentase cakupan penanganan pengawasan**	**100 Persen**	**6.749.998.715**	**4.129.960.545**
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bandung	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 Persen	380.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bandung	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100 Persen	1.852.175.300	1.472.175.300
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	140.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	217.000.000	77.000.000
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	240.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bandung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1.635.175.300	1.395.175.300

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Penambahan / Pergeseran
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bandung	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94 Persen	2.240.038.170	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bandung	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	94 Persen	4.897.823.415	2.657.785.245
	6.01.03.2.02 .0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 perangkat daerah	223.500.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62 perangkat daerah	221.300.000	(2.200.000)
	6.01.03.2.02 .0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62 perangkat daerah	235.050.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62 perangkat daerah	400.000.000	164.950.000
	6.01.03.2.02 .0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bandung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	1.507.988.170	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bandung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	3.710.659.415	2.202.671.245
	6.01.03.2.02 .0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	273.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bandung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	565.864.000	292.364.000
Jumlah Total						**27.692.776.007**	**Jumlah Total**				**51.471.852.109**	**23.779.076.102**

Berdasarkan perhitungan kebutuhan pada tabel diatas, maka didapatkan persentase anggaran APIP Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan adalah :

1. Belanja Daerah Rp. 6.007.122.950.033
2. Mandatory Anggaran APIP (0,5%) Rp. 30.035.614.750
3. Rancangan Kebutuhan Anggaran APIP (Diluar Gaji dan Tunjangan ASN) Rp. 43.627.455.069
4. **Persentase** **0,72**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat selama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat, Namun demikian isu-isu yang strategis maupun permasalahan yang berkembang dimasyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.4.
TABEL TC-32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Daerah Tahun 2024 yang memuat kebijakan dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
   Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.
   Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
   a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
   b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
   a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
   b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
   c. Reviu Laporan Keuangan
   d. Kegiatan Pengawasan Lainnya
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021–2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Bandung adalah :

"Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera".

Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang antara lain :

1. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya;
2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang Wilayah;
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan penting dalam menunjang terwujudnya visi tersebut yaitu***"Tata Kelola Pemerintahan yang Baik "*** dan pada misi ke 5 (lima) yaitu ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih".***

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 , ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2022 tentang rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel.

B. Sasaran

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik;
b. Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan;
c. Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi.

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel		Persentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	100%
		Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Nilai Level Kapabilitas APIP	3
			Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal/ BPK	74
		Meningkatnya Peran APIP dalam Reformasi Birokrasi	Persentase Unit Kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi		Nilai AKIP	82 Poin
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai SKM	79 Poin
			Persentase Asset Dalam Kondisi Baik	80%

Sumber : Perbup Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra InspektOrat Daerah tahun 2021-2026

Sedangkan sasaran terhadap indikator-indikator inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tercapainya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM Nilai BMD		
1	Menyelenggarakan kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	
a	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b	Menyediakan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c	Menyediakan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d	Menyediakan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
e	Menyediakan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f	Menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h	Melaksanakan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
I	Melaksanakan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
2	Menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan PD	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
b	Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
c	Menyediakan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d	Menyediakan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	Meningkatnya Kinerja ASN PD	Tercapainya Kinerja ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	
a	Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
b	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran	
a	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
b	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
c	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
d	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
e	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
f	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
g	Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
h	Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	
a	Menyediakan Mebel yang disediakan	Tersedianya Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
b	Menyediakan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
c	menyediakan unit aset tak berwujud yang disediakan	Tersedianya unit aset tak berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
6	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran	
A	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
B	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
7	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	Terpenuhinya operasional perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Operasional Perkantoran	
a	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
b	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
c	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
d	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II	Tercapainya Profesionalisme Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan		
1	Tercapainya penyelenggaraan pengawasan internal berdasarkan PKPT/Non PKPT	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal berdasarkan PKPT/Non PKPT	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT/Nom PKPT	
a	Melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
b	Melaksanakan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
c	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
d	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
e	Melaksanakan Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
f	Melaksanakan Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
g	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2	Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	
a	Menangani Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
b	Melaksanakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
III	Tercapainya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase cakupan penanganan pengawasan		
1	Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
a	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
b	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tercapainya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Pendampingan dan Asistensi terlaksana	
a	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
b	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
c	Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
d	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi.Dalam rangka itu perlu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Sedangkan sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan serta sasaran Inspektorat Daerah, terdapat 2 Program yang menjadi sistem inti (*Core System*) dari proses bisnis pada Urusan Bidang Pengawasan yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Satu program yang lainnya merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan *supporting system* atas proses bisnis utama Inspektorat Daerah.

Program yang ada di Inspektorat Daerah untuk Rancangan Awal Renja Tahun 2024 adalah sebanyak 3 Program dengan 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan, sedangkan pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 berkurang 1 Sub Kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor sehingga pada Rancangan Akhir terdapat 3 Program dengan 11 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan.

Hal ini berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu dimana sub kegiatan tersebut hanya dipergunakan jika terdapat jasa sewa untuk peralatan-peralatan yang tidak dimiliki. Untuk Tahun 2025, anggaran kebutuhan

tersebut belum diperlukan, sehingga sub kegiatan tersebut dihilangkan. Adapun Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC. 33 berikut.

Tabel 3.3
TABEL TC. 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSPEKTORAT DAERAH				**51.471.852.109**				**27.918.945.326**
06	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**51.471.852.109**				**27.918.945.326**
06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**51.471.852.109**				**27.918.945.326**
06:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bandung**	**82 Point**	**39.643.297.694**			**82 Point**	**22.900.833.422**
		Nilai IKM	**Kab. Bandung**	**79 Point**	**-**			**80 Point**	**-**
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kab. Bandung	28 Dokumen	68.000.000			28 Dokumen	35.000.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	4 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	5.000.000
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Data	23.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kab. Bandung	100 Persen	28.560.097.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	20.951.686.022
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	93 Orang/bulan	28.517.517.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH		93 Orang/bulan	20.933.606.022
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bandung		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bandung	12 Dokumen	14.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	4.080.000
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	2 Laporan	14.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	4.250.000
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	14.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	9.750.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	Kab. Bandung	100 Persen	2.210.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	480.060.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	230.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung	44 Orang	1.980.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Orang	430.060.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kab. Bandung	100 Persen	2.948.099.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	408.099.400
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	58.149.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	8.149.400
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	2.150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	-
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	53.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	3.720.000
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	74.507.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	110.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	7 Paket	123.682.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Paket	58.190.000
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	23.400.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	11 Laporan	114.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Laporan	84.640.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	348.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	120.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Bandung	100 Persen	3.002.565.084	DANA TRANSFER		100 Persen	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	2.355.165.084	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	647.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Bandung	0 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kab. Bandung	100 Persen	2.118.876.170	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	720.488.000
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	12 Laporan	22.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	7.500.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	421.193.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	105.693.600
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	50.000.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	1.670.182.570	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Laporan	557.294.400
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Kab. Bandung	100 Persen	735.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	205.500.000
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	2 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	23.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	24 Unit	150.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Unit	130.600.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	20.000.000
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	525.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	31.900.000
06:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**5.078.555.700**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**		**100 Persen**	**2.211.804.415**
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	Kab. Bandung	100 Persen	3.598.018.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	1.215.319.415
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	78 Laporan	402.270.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		78 Laporan	210.100.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	18 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	120.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bandung	84 Laporan	239.708.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		84 Laporan	115.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bandung	8 Laporan	275.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	85.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Bandung	100 Laporan	963.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Laporan	409.760.000
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Bandung	1 Kesepakatan	1.005.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kesepakatan	75.459.415

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bandung	62 Dokumen	512.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62 Dokumen	200.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bandung	100 Persen	1.480.537.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	996.485.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	98 Laporan	522.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98 Laporan	639.285.000
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Bandung	30 Laporan	958.337.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	357.200.000
06:01:03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase cakupan penanganan pengawasan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**6.749.998.715**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**		**100 Persen**	**2.806.307.489**
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kab. Bandung	100 Persen	1.852.175.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	400.000.000
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Bandung	4 Rekomendasi	217.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	150.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Bandung	4 Rekomendasi	1.635.175.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	250.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	Kab. Bandung	94 Persen	4.897.823.415	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	2.406.307.489
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	62 perangkat daerah	221.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62 perangkat daerah	273.500.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bandung	62 perangkat daerah	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62 perangkat daerah	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bandung	10 Kegiatan	3.710.659.415	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Kegiatan	1.609.307.489
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bandung	10 perangkat daerah	565.864.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 perangkat daerah	273.500.000
Jumlah Total					**51.471.852.109**				**27.918.945.326**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 berasaskan pada Program Kerja pengawasan Tahunan yang akan disusun secara simultan dengan Rencana kerja ini. Rencana Kerja Inspektorat Daerah selain pemenuhan terhadap unsur penunjang adalah sebagai berikut :

1. Audit Kinerja
2. Audit Reguler *(Current Issues)*
3. Audit tertentu, yang terdiri dari :
   - Audit Khusus Kas Opname dan Stok Opname
   - Audit Khusus PAD
   - Audit Khusus Fisik;
   - *Audit Khusus Dana Desa;*
   - Audit Khusus Dana BOS;
   - Audit Khusus Dana Bantuan COVID 19
   - Probity Audit;
   - Pemeriksaan Kasus Laporan Pengaduan masyarakat, Peningkatan Status Pemeriksaan, Pelimpahan Pemeriksaan dari SKPD Terkait dan atau atas Perintah Pimpinan yang berwenang (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur).
4. Pemantauan
   - Pemantauan Pengelolaan Dana BOS (SD & SMP)
   - Pemantauan Pelaksanaan SPIP/MR;
   - Pemantauan Kegiatan Rapat Diluar Kantor.
   - Pemantauan Responsif Gender
   - Pemantauan Benturan Kepentingan
5. Reviu
   - Reviu RKPD;
   - Reviu KUA PPAS;
   - Reviu RKA PD;
   - Reviu RKA PD Perubahan;
   - Reviu LKPD;
   - Reviu LKIP Kabupaten;
   - Reviu LPPD;

- Reviu DAK FISIK;
- Reviu BTT

6. Evaluasi dan Kormonev
   - Evaluasi SAKIP PD;
   - Evaluasi PMPRB;
   - Evaluasi zona Integritas;
   - Evaluasi PPG;
   - Kormonev Pelayanan Publik
     - Pelayanan Perijinan
     - Pelayanan Kependudukan
7. Tindak Lanjut
   - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
   - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
   - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
   - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kab. Bandung;
8. Pembinaan
   - Pembinaan Wilayah Desa;
   - Jasa Konsultasi.
9. Pengembangan SDM APIP

Untuk menunjang Rencana Kerja tersebut perlu didukung dengan pendanaan yang memadai agar tercapainya seluruh Tujuan dan Sasaran Inspektorat daerah, yang mana pendanaan tersebut dapat kami uraikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	INSPEKTORAT DAERAH				**51.471.852.109**		
06	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**51.471.852.109**		
06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**51.471.852.109**		
06:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bandung**	**82 Point**	**39.643.297.694**		
		Nilai IKM	**Kab. Bandung**	**79 Point**	**-**		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kab. Bandung	28 Dokumen	68.000.000		
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	4 Dokumen	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	4 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	4 Data	23.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kab. Bandung	100 Persen	28.560.097.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	93 Orang/bulan	28.517.517.040	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bandung		-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bandung	12 Dokumen	14.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	2 Laporan	14.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	14.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80%	Kab. Bandung	100 Persen	2.210.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	230.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bandung	44 Orang	1.980.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kab. Bandung	100 Persen	2.948.099.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	58.149.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	2.150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	53.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Paket	74.507.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	7 Paket	123.682.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	11 Laporan	114.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	12 Laporan	348.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Bandung	100 Persen	3.002.565.084	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	2.355.165.084	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	647.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Bandung	0 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kab. Bandung	100 Persen	2.118.876.170	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bandung	12 Laporan	22.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	421.193.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	1.670.182.570	DANA TRANSFER UMUM-DANA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Kab. Bandung	100 Persen	735.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	2 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	24 Unit	150.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	525.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
06:01:02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**5.078.555.700**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	Kab. Bandung	100 Persen	3.598.018.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	78 Laporan	402.270.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	18 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bandung	84 Laporan	239.708.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bandung	8 Laporan	275.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Bandung	100 Laporan	963.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Bandung	1 Kesepakatan	1.005.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bandung	62 Dokumen	512.540.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kab. Bandung	100 Persen	1.480.537.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bandung	98 Laporan	522.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Bandung	30 Laporan	958.337.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
06:01:03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase cakupan penanganan pengawasan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**6.749.998.715**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kab. Bandung	100 Persen	1.852.175.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Bandung	4 Rekomendasi	217.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Bandung	4 Rekomendasi	1.635.175.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3	Kab. Bandung	94 Persen	4.897.823.415	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bandung	62 perangkat daerah	221.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bandung	62 perangkat daerah	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bandung	10 Kegiatan	3.710.659.415	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bandung	10 perangkat daerah	565.864.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
Jumlah Total					**51.471.852.109**		

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam kerangka dan segala kondisi yang ideal. Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaanya yaitu :

1. Prioritas Pengawasan: Tentukan prioritas pengawasan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Fokuskan pengawasan pada program dan kegiatan yang memiliki potensi risiko tinggi dan nilai strategis bagi pembangunan daerah.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia: Pastikan bahwa sumber daya manusia di Inspektorat Daerah memiliki kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam melakukan pengawasan dan penegakan integritas. Perkuat pula kerjasama dengan sumber daya manusia dari instansi lain jika diperlukan.
3. Keterbukaan dan Transparansi: Utamakan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja Inspektorat Daerah. Publikasikan secara berkala hasil pengawasan dan laporan evaluasi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Perkuat kerjasama dengan lembaga pemerintahan terkait, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya untuk memperkuat tindakan investigasi dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
5. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Lakukan perencanaan anggaran yang cermat dan efisien, prioritaslah kegiatan yang esensial dan memberikan dampak nyata bagi pengawasan dan pelayanan masyarakat.
6. Penggunaan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan data dalam Inspektorat Daerah.

7. Penyuluhan dan Edukasi: Tingkatkan program penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai peran dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mendorong partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah.
8. Fleksibilitas dan Inovasi: Beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pemerintahan daerah, serta selalu berinovasi dalam pengawasan untuk meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Daerah.

Dalam hal terjadi keterbatasan anggaran, yang perlu mendapatkan catatan adalah :

1. Prioritaskan Kegiatan yang Kritis: Prioritaskan kegiatan yang paling kritis dan strategis untuk tetap menjalankan fungsi inti Inspektorat Daerah dalam pengawasan dan penegakan integritas.
2. Evaluasi dan Penyesuaian: Evaluasi secara berkala kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah untuk mengidentifikasi kemungkinan penyesuaian anggaran dan perubahan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan aktual.
3. Kolaborasi Antarinstansi: Tingkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk membagi sumber daya dan bertukar pengalaman, sehingga potensi pengawasan bersama dapat dioptimalkan.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sebagai panduan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025, terdapat beberapa kaidah atau prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Integritas: Menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh integritas, kejujuran, dan profesionalisme, tanpa adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun.
2. Independensi: Menjaga independensi dalam melakukan pengawasan dan penegakan integritas, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan dapat bekerja secara netral.
3. Transparansi: Menjunjung tinggi transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan Renja, termasuk dalam penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil.
4. Akuntabilitas: Bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari pelaksanaan Renja, serta mampu memberikan

pertanggungjawaban secara terbuka dan jelas kepada masyarakat.

5. Efisiensi dan Efektivitas: Menjalankan Renja dengan efisiensi dan efektivitas, memastikan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
6. Berkelanjutan: Menyusun Renja sebagai panduan kerja jangka panjang, yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
7. Evaluasi dan Perbaikan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja dan hasil yang dicapai, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.
8. Pemberdayaan Pegawai: Mendorong pemberdayaan pegawai dalam pelaksanaan Renja, sehingga mampu berkontribusi secara aktif dan inovatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5.3. Rencana tindak lanjut

Berikut adalah beberapa rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025:

1. Pembentukan Tim Kerja: Membentuk tim kerja khusus untuk setiap program atau kegiatan dalam Renja, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memantau progres dan hasil pelaksanaan Renja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, sehingga dapat mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
3. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Memperkuat koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan integritas.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam pengawasan dan investigasi.

5. Penguatan Sistem Informasi: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem terintegrasi dalam pengumpulan data, pelaporan, dan analisis, guna mendukung pengawasan yang lebih efisien dan akurat.
6. Pengembangan Inovasi: Mendorong inovasi dalam metode dan pendekatan pengawasan untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang semakin kompleks dalam pemerintahan daerah.
7. Pengoptimalan Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang strategis dan memiliki dampak nyata dalam pengawasan pemerintahan daerah.

Dengan mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam Renja tahun 2024 dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang positif bagi pelayanan publik dan integritas pemerintahan daerah.

INSPEKTUR,

ttd.

MARLAN NIRSYAMSU

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA